

BPK-RI Sepakati Cara Mengakses Data dengan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Kalimantan Barat

Cornelis: Keberadaan BPK-RI Hendaknya Jangan Ditakuti, Tetapi Jadikan Sebagai Mitra Kerja

Pontianak. GENTA. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan 15 pemerintah provinsi, kabupaten/kota se-provinsi Kalimantan Barat tentang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Penandatanganan Nota kesepahaman dilakukan oleh kepala perwakilan BPK-RI Provinsi Kalimantan Barat Ir, Adi Sudibyo, MM dengan para pemimpin pemerintah daerah tersebut di Aula Kantor BPK-RI Perwakilan Propinsi Kalimantan Barat.

Kegiatan ini disaksikan oleh Ketua BPK-RI Drs.Hadi Poernomo,AK, anggota I BPK-RI Dr.Moermahadi Soerja Djanegara, SE,Ak,MM,CPA, Gubernur Kalimantan Barat DR.Cornelis,MH, Pimpinan DPRD, Bupati, Pimpinan instansi vertikal Provinsi Kalimantan Barat dan para pejabat dilingkungan BPK-RI, beberapa waktu lalu.



Dalam pemaparannya Ketua BPK-RI Drs.Hadi Poernomo, AK menjelaskan, Penandatanganan Nota kesepahaman ini merupakan langkah strategis dalam rangka mewujudkan sinergi antara BPK-RI dengan para pemangku kepentingan, termasuk diantaranya dengan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung,

jawab keuangan Negara BPK-RI mendapat kewenangan meminta data/dokumen kepada pihak yang diperiksa (auditee) dan/atau pihak lain yang terkait. Untuk mempermudah perolehan data/dokumen, BPK-RI memprarsai pembentukan pusat data dengan auditee melalui link and match.

Melalui Nota kesepahaman ini, selanjutnya

Bersambung ke halaman 11

akan dibentuk pusat data BPK-RI dengan menggabungkan data elektronik BPK-RI (E-BPK) dengan data elektronik auditee (E-auditee). Melalui pusat data tersebut, BPK-RI dapat melakukan perekaman, pengolahan, pemanfaatan dan monitoring data yang bersumber dari berbagai pihak dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Dengan cara ini, monitoring keuangan Negara akan semakin kuat dan pemeriksaan BPK-RI akan semakin efisien dan efektif. Konsep seperti ini disebut dengan Sinergi," paparnya.

Lebih lanjut disampaikan, BPK-RI mengharapkan melalui BPK sinergi tersebut akan memberikan manfaat yaitu: 1. mengurangi KKN secara sistemik, 2. mendukung optimalisasi penerimaan Negara, 3. mendukung efisiensi dan aktifitas pengeluaran Negara, apabila inisiatif BPK tersebut dapat direalisasikan maka optimalisasi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara akan lebih cepat terwujud, sehingga diharapkan dapat dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai dengan pasal 10 huruf a dan b UU No. 15 tahun 2006, BPK-RI memiliki kewenangan untuk meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan setiap orang, unit organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia (BI), BUMN, BLU, BUMD atau dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara, oleh karena itu, perlu dipahami bahwa tanpa Nota kesepahaman bersama ini BPK-RI tetap berwenang untuk mengakses data pemerintah daerah yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan atas

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Nota kesepahaman ini lebih mengatur tata cara akses data terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara," jelasnya.

Melalui Nota kesepahaman ini, BPK-RI berharap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara dapat lebih optimal, sehingga hasilnya dapat dipergunakan untuk mendorong terwujudnya keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebelumnya BPK-RI telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan lembaga Negara, lembaga perwakilan, kementerian Negara/ lembaga, BUMN dan pemerintah daerah lainnya, termasuk dengan supreme audit Institution Negara lain (BPK Luar Negeri).

Dengan penandatanganan nota kesepahaman ini, BPK-RI telah menandatangani 939 nota kesepahaman dengan rincian, MoU BPK-RI yang telah dilaksanakan sampai dengan 16 juni 2011: DPRD 514, BPK Luar Negeri 13, Lembaga Negara 6, Kementerian 34, Non Kementerian 40, BUMN 141, Pemerintah Daerah 939, termasuk diantaranya 412 nota kesepahaman tentang pengembangan dan pengelolaan informasi untuk akses data," jelasnya lagi.

Selain itu Gubernur Kalimantan Barat DR. Cornelis, MH dalam sambutannya menyampaikan, " seiring dengan bergulirnya reformasi birokrasi serta semakin tingginya ekspektasi masyarakat akan terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance), seluruh jajaran pemerintah tanpa terkecuali, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah, dituntut untuk terus meningkatkan

kompetensi dan kinerja guna terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik yang profesional, responsif, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Dalam konteks itulah, saya memandang penandatanganan nota kesepahaman pengembangan dan pengelolaan e-auditee BPK-RI ini sangat urgent, karena memberikan arti penting bagi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah," ujarnya.

"Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, saya menyambut baik mengenai penerapan sistem informasi untuk akses data ini, sehingga input data dan informasi dapat diakses dengan cepat, efektif, efisien dan ekonomis (3E). untuk itu hendaknya nota kesepahaman ini perlu segera di wujudkan, karena selain mempercepat arus informasi dan data, juga dapat mempersingkat kerja bagi auditor BPK-RI dalam mengumpulkan bukti-bukti sebagai bahan pemeriksaan yang diperlukan selama proses pemeriksaan berlangsung.

Guna mendukung pengelolaan system informasi akses data ini, maka system aplikasi computer sebagai infrastruktur jaringan komunikasi, dan prosedur akses data yang dipergunakan serta tenaga operatornya perlu segera di persiapkan dengan baik, karena sistem apapun yang kita bangun, jika perangkat lunak dan perangkat kerasnya tidak didukung dengan SDM (tenaga operatornya) maka sulit untuk terwujud," ujarnya lagi.

Lebih lanjut Gubernur mengatakan, dengan metode system Informasi e-auditee ini, tentunya diharapkan sinergi antara sis-

tem informasi internal BPK-RI dengan system informasi milik entitas pemeriksaan, akan membentuk sebuah komunikasi data secara online dan secara sistematis membentuk pusat data tanggungjawab keuangan Negara di BPK. Selain itu melalui system ini, diharapkan juga, transmisi pemeriksaan tidak menjadi suatu beban dan keharusan, melainkan menjadi suatu kebutuhan, demi peningkatan sistem pengelolaan keuangan Negara/daerah yang transparan dan akuntabel, serta memberikan manfaat bagi e-auditee dalam rangka meningkatkan validitas dan akurasi data sector public sebagai wujud mendukung penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang Good Governance dan Clean Government.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, BPK-RI sebagai Lembaga Negara dibentuk untuk melaksanakan satu tugas, yaitu, memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara/ daerah, dan melaporkannya kepada lembaga perwakilan (DPR/DPRD) sebagai pemegang hak budget, semua ini diajukan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan Negara/daerah yang merupakan pondasi utama bagi terciptanya demokrasi politik dan ekonomi yang sesungguhnya.

Untuk itu Gubernur berharap, untuk perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kalimantan barat ini, keberadaan BPK-RI hendaknya jangan kita takuti, tetapi dijadikan sebagai mitra kerja, memperbaiki kelemahan-kelemahan baik di bidang pengelolaan keuangan maupun system pengendalian intern pemda," harapnya. (wan)